

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 18 TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI DANA PENSIUN
(Studi Kasus pada PT. Bank BTPN Makassar)**

SKRIPSI

OLEH

**ENDANG
105730431313**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 18 TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI DANA Pensiun
(Studi Kasus pada PT. Bank BTPN Makassar)**

ENDANG

105730431313

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (s1)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Myhammadiyah Makassar

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

MOTTO

Dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, dianggap sedang berjuang di jalan Allah sampai kembali

(Hr. Tirmidzi)

“Berjuang di jalan Allah”

skripsi ini ku persembahkan untuk :

- *Allah swt atas rahmat yang diberikan*
- *Ibu, bapak serta nenekku yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan*
- *Ieman-teman terkasihku' sahabat sejak di bangku sekolah serta seluruh pihak yang selalu men-support dan menyertai*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ENDANG**, NIM: **10573 04313 13**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0001/2019, tanggal 04 Jumadil Akhir 1440 H/09 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H
09 Februari 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.
2. Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
3. Saida Said, S.E., M.Ak.
4. Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M.

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Penerapan PSAK NO 18 Dana Pensiun
Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus ada PT.
Bank BTPN Makassar)

Nama Mahasiswa : ENDANG

No. Stambuk/NIM : 105730431313

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan dan diseminarkan pada tanggal 9 Februari 2019

Makassar, Februari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si
NIDN: 0031126074

Pembimbing II,

Linda Arisanty Razak, SE., M.Si, Ak. CA
NIDN: 0920067702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak., CA, CSP
NBM: 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG

Stambuk : 10573 04313 13

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Analisis Penerapan PSAK No. 18 terhadap Laporan Keuangan Akuntansi Dana Pensiun (Studi Kasus pada PT. Bank BTPN Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H
09 Februari 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

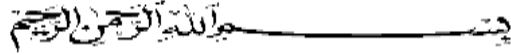


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.CSP.
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikumwarahmatullahiwabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan PSAK No. 18 Dana Pensiun terhadap Laporan Keuangan Dana Pensiun (Studi Kasus pada PT. Bank BTPN Makassar)**“.

Dalam proses pembuatan Skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si., AK, CA selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makasssar.
4. Bapak dan Ibu Dosen akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaran kegiatan perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi.
5. Dr.H.Muhammad Rusydi,M.Si dan Linda Arisanty Razak,SE,M.Si.Ak.CA selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Kepala kantor Bank BTPN Makassar yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Kedua orang tuaku, penulis ucapkan banyak terimah kasih untuk semua bimbingan, nasehat dan dukungannya sehingga penulis bias jadi seperti sekarang beserta keluargaku yang selama ini banyak memberikan bantuan.
8. Buat teman-teman akuntansi 7 angkatan 2013 khususnya Khaeruddin, SE., Adam, SE., Arif, SE., Nur Irawanti, Harlina puspitasari SE, dan juga yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
9. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsure kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini bernilai ibadah di sisi-Nya serta bermamfaat bagi yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga aktivitas yang telah kita lakukan mendapat bimbingan, bernilai ibadah dan Ridho dari-Nya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Makassar, Februari 2019

Penulis

Endang

ABSTRAK

ENDANG, 2018 Analisis Penerapan PSAK No.18 Terhadap Laporan Keuangan dana Pensiun (studi kasus pada PT.Bank BTPN Makassar) Sulawesi Selatan, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Bapak Muhammad Rusydi Dan Pembimbing II Ibu Linda Arisanty Razak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada dana pensiun PT.Bank BTPN Makassar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.18. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara. dan laporan keuangan dana pensiun PT.Bank BTPN Makassar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan dana pensiun PT.Bank BTPN Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.18.

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.18 mengenai akuntansi dana pensiun dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan dan pensiun PT.Bank BTPN Makassar telah sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.18

Kata Kunci: Akuntansi Dana Pensiun PT.Bank BTPN, PSAK No. 18

ABSTRACT

ENDANG, 2018 *Analysis Application Financial Statement Standard PSAK No.18 concerning the pension fund. accaounting (case study on PT Bank BTPN) of south Sulawesi. Theses Courses in Accounting and Business Economic University Muhammadiyah Makassar. Guided by Mentors And Counselors I Muhammad Rusydi II Linda Arisanty Razak.*

This research aims of know the prosedur anda accounting treatment of pension funds is applied to the pension fund of PT.Bank BTPN. Based on the statement of financial accounting standars PSAK No.18. the type of research used in a desscriptiv qualitative research. The data is from the results of the interview and the financial report of the pension fund of PT.Bank BTPN. Analytical techniques used in the study is the analysis of the comparative i.e.Comparing retirement fund financial statements of PT.Bank BTPN with statement of financial accounting standars PSAK No.18.

Based on the result of the research the application of the statement of financial accounting standars PSAK No.18 concerning the pension fund accounting it can be concluded that the record-keeping and the reporting of pension fund PT.Bank BTPN has been in accordance with the statement of accounting standars finance PSAK No.18.

Keywords : *pension PT.Bank BTPN,PSAK No.18.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYERTAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tempat Penelitian	6
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dana Pensiun	8
B. Jenis Dan Status Hukum Dana Pensiun	10
C. Manfaat dana pensiun pasti.....	12
D. Jenis Program Dana Pensiun	13
E. Asas Dana Pensiun.....	19
F. Akuntansi Dana Pensiun Menurut PSAK No.18.....	21

G. Akuntansi Untuk Pensiun	26
H. Penelitian Terdahulu	27
I. Kerangka Pikir	29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
E. Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian.....	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Struktur organisasi dan Job Description.....	41
C. Hasil penelitian.....	44
D. Pemahasan	61

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NOMOR	JUDUL	HALAMAN
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2	Data Informan	44
Tabel 2.3	Tabel kesesuaian laporan keuangan dana pensiun PT.bank BTPN dengan psak no.18	53
Tabel 5.1	Perbandingan Program Dana Pensiun dengan PSAK 18	61

DAFTAR GAMBAR

NOMOR	JUDUL	HALAMAN
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dana Pensiun PT.Bank BTPN	41
Gambar 4.4	Hasil Analisis Dana Pensiun Bank BTPN	64

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Laporan Keuangan
Lampiran 4	Surat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktivitas menerima simpanan dari masyarakat. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting baik, bagi pemilik dan karyawan. Karyawan memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memberikan kinerja optimal sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. Karyawan harus memiliki suatu kesadaran bahwa hidup mereka sangat bergantung pada perusahaan dimana mereka bekerja. Pada saat mereka masih aktif, penghasilan nampaknya bukanlah menjadi persoalan. Namun jika suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut, maka kehidupan mereka akan terganggu. Persoalan hari tua (usia lanjut) atau berhenti bekerja sewaktu-waktu secara langsung atau tidak merupakan hal yang perlu dipersiapkan. Hal ini mungkin juga berpengaruh kepada konsentrasi kerja karyawan dan bukan tidak mungkin jika akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas karyawan.

Kebijakan tersebut perlu pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua. Lembaga tersebut adalah dana pensiun. Dengan adanya dana pensiun ini menjadi pembiayaan yang didapatkan para pekerja ketika

seseorang tidak mampu lagi bekerja karena usianya yang sudah lanjut. Pensiun biasanya dikarenakan kemauan sendiri atau usia telah mencapai masa pensiun.

Dana pensiun diselenggarakan untuk memberikan kesejahteraan bagi para karyawan. Oleh karena itu baik instansi pemerintahan maupun swasta mengadakan program pensiun bagi para pegawai atau karyawannya. Ditinjau dari segi ekonomi, dana dalam program pensiun bertujuan dalam mengatur tentang akuntansi dan pelaporan oleh dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan, serta untuk menunjang para pengguna laporan yang terkait dengan laporan keuangan. Informasi laporan keuangan ini diinformasikan tidak hanya kepada manajemen pengelolaan dana pensiun perusahaan terkait tetapi juga kepada peserta dana pensiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan investasi dana pensiun, kegiatan operasional dana pensiun, apakah telah dilakukan secara efisien dan wajar

Pelaporan dana pensiun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tidak memberikan keputusan yang salah. Pengelolaan dana pensiun baik pada setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta (BUMS) diberi kesempatan mendirikan dana pensiun bagi pegawainya.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 11 tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun, bahwa tugas utama dana pensiun berdasarkan maksud dan tujuannya yaitu mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PMP) untuk memelihara kesinambungan dan penghasilan bagi peserta pada hari tua.

Mengingat bahwa dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan pada perusahaan umumnya maka perlu disusun standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku khusus untuk dana pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.18. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 18 sebelumnya pernah di teliti oleh beberapa peneliti terhadap bagaimana penerapan PSAK No.18 yang diterapkan pada perusahaan yang ada di Indonesia terhadap ketentuan yang berlaku

Puspitasari dkk (2016) dengan judul penelitian evaluasi penerapan standar akuntansi keuangan No.18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya PT.Bank Negara Indonesia (Persero) tbk, menganalisis kesesuaian penerapan standar Akuntansi Keuangan No.18 pada pelaporan dana pensiun Bank Negara Indonesia karena dilihat dari pelaporan keuangan manfaat purnakarya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaporan program manfaat iuran pasti purnakarya. Kemudian pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No.18

Nussy (2014) dengan judul penelitian analisis penerapan PSAK No.18 mengenai akuntansi dana pensiun pada PT.Taspen cabang manado menganalisis mengenai kesesuaian penerapan akuntansi dana pensiun Taspen Cabang Manado dengan pernyataan standar dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.18. hasil penelitian ini didasarkan pada laporan aset bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, dan Neraca tahun 2012 dan 2013 menunjukkan hasil bahwa proses akuntansi yang

diterapkan oleh dana pensiun Taspen secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No.18. Dari penerapan PSAK yang diterapkan oleh penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank BTPN Makassar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK NO.18 Mengenai Dana Pensiun Terhadap Laporan Keuangan pada Bank BTPN Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah “Apakah penerapan akuntansi yang diterapkan pada Dana Pensiun Bank BTPN telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan NO 18”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :Untuk mendeskripsikan hasil pelaporan keuangan Dana Pensiun apakah telah sesuai dengan PSAK No.18

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Peneliti Mampu memberikan tambahan referensi dan teori-teori mengenai penerapan psak no 18 tentang akuntansi dana pensiun terhadap laporan keuangan dana pensiun.selain itu juga sebagai media tambahan penulis selanjutnya bagi peneliti.

2. Bagi akademik

Sebagai referensi dalam pencatatan dan penerapan standar keuangan agar tujuan dapat dijadikan informasi maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai Dana Pensiun.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada BTPN terutama yang ada di Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dana Pensiun

Perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada pensiun perjanjian

Dana pensiun menurut Kasmir (2014: 67) adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab–sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, pensiun adalah merupakan sumber bagi pemenuhan kebutuhan bagi seseorang, ketika yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi.

Selain itu alasan yang menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap dana pensiun adalah harapan hidup yang semakin meningkat dan umur pensiun yang semakin muda. Semakin senior seseorang dalam perusahaan, semakin tinggi gaji yang di minta, sementara produktivitasnya semakin menurun keadaan itu mendorong perusahaan BTPN untuk mem pensiunkan pekerjaan yang sudah tua dan mempekerjakan tenaga yang lebih muda. Dengan umur pensiun yang lebih muda dan kebutuhan yang telah meningkat membuat mereka membutuhkan perlindungan dana pensiun. Selain itu, masyarakat modern semakin sadarkan kesejahteraan jangka

panjang sehingga menganggap perlu melengkapi dirinya dengan perlindungan dana pensiun.

Sumber penghasilan pensiun bisa berasal dari sumbangan anak saudara, dari tabungan / investasi pribadi, atau program pensiun yang disponsori oleh pemberi kerja (perusahaan). Sumber penghasilan pensiun yang berasal dari sumbangan anak saudara, seperti yang dijelaskan di atas, menjadi sangat sulit dengan konsep kekeluargaan saat ini yang lebih berorientasi individu. Sedangkan sumber penghasilan pensiun berupa tabungan / investasi tidak mudah dilakukan karena enggan / tidak mau. Kekurangan/ ketidakmampuan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penghasilan yang pas-pasan, tidak disiplin, atau kurang informasi mengenai kebutuhan setelah investasi.

Perusahaan BTPN adalah mensponsori program pensiun bagi pekerjanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan pemerintah mengenai tenaga kerja, rasa terima kasih kepada mantan pekerjanya, atau karena tuntutan dari serikat pekerja.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1992, definisi dana adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan.

Dana pensiun pada BTPN memberikan kebijakan pada masyarakat karena kebutuhan dananya relatif lebih mudah di prediksi (lihat kembali karakteristik instrumen dana pensiun, mereka tidak terlalu memerlukan dana likuid seperti halnya perusahaan dana pensiun tidak seperti perusahaan lain menginvestasikan sebagian dananya di pasar uang untuk sementara waktu (untuk mencari keuntungan jangka pendek), sampai ada peluang investasi yang lain lebih menguntungkan (ingat, suku bunga jangka Pendek. Berfluktuasi, hingga memungkinkan memperoleh keuntungan jangka pendek di bandingkan jangka panjang, dan bila suku bunga jangka pendek menurun investor dapat mengubahnya ke investor jangka panjang).

B. Jenis Dan Status Hukum Dana Pensiun

Perkembangan dana pensiun di Indonesia dapat dikelola oleh *sector public* maupun *sector swasta*. Dalam penelitian yang dilakukan Saefuloh, et al (2015) menjelaskan bahwa terdapat empat badan yang mengelola dana pensiun yaitu:

- a. Tabungan dana asuransi pensiun (taspen) yaitu program pensiun yang khusus di berikan kepada pegawai negeri sipil (PNS).
- b. Asuransi angkatan bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yaitu program pensiun yang di berikan khusus untuk anggota TNI.
- c. Jaminan sosial tenaga kerja (jam sostek) melalui UU No 1992 tentang jamsostek bagi perusahaan yang ikut jamsostek, yaitu program jaminan harta hari tua (JHT) yang di gunakan untuk karyawan, baik swasta maupun BUMN.
- d. Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana pensiun lembaga keuangan (DLPK), yaitu program pensiun untuk karyawan dan pekerja mandiri.

Jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Dana pensiun pemberi kerja

Dana pensiun yang di bentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan.

b. Dana pensiun lembaga keuangan

Dana pensiun yang hanya menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Sedangkan menurut PSAK 18 menjelaskan program dana pensiun dibagi menjadi yaitu:

a) Program iuran pasti

Program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya di mana jumlah yang di bayarkan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya

b) Program manfaat pasti

Program manfaat pasti adalah program manfaat dana pensiun di mana jumlah yang di bayarkan sebagai manfaat dana pensiun ditentukan dengan mengacu pada di tetapkan 56 tahun usia wajib pensiun ditetapkan 60 tahun.

C. Manfaat Dana Pensiun Pasti

Menurut Taswan (2015:5),ada lima manfaat pensiun yaitu:

1. Manfaat pensiun normal
2. Manfaat pensiun di percepat
3. Manfaat pensiun cacat
4. Manfaat pensiun di tunda
5. Manfaat pensiun janda/duda/anak

Menurut Wahab (2010: 5) manfaat pensiun sebagai berikut:

- 1) Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai di bayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia normal atau sesudahnya.
- 2) Manfaat pensiun di percepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada sekurang-kurangnya 46 tahun
- 3) Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang di tunjuk oleh pemberi kerja
- 4) Manfaat pensiun di tunda adalah hak atas pensiun di tunda yang di bayarkan pada saat usia pensiun di percepat atau setelahnya.

D. Jenis Program Dana Pensiun

1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun iuran pasti mengacu pada kontribusi pekerja untuk program dana pensiun pensiunnya. Biasanya, perusahaan / pemberi kerja memotong persentase tertentu dari gaji karyawannya sebagai iuran pensiun. Kemudian oleh *fund manager* yang bertindak sebagai *trustee*, menginvestasikan dana yang di akumulasikan tersebut pada asset jangka panjang. Jenis program pensiun iuran pasti yaitu:

a) *Profit sharing*

Profit sharing merupakan program pensiun iuran pasti yang iurannya berdasarkan keuntungan perusahaan /pemberi kerja. Semua iuran yang dibutuhkan menjadi tanggung jawab perusahaan /pemberi kerja. *Profit sharing* kadang membolehkan

pekerja untuk memberikan iuran secara sukarela pemberi kerja pada umumnya membayar iuran di muka yang besarnya bisa berupa presentase dari keuntungan kompensasi pekerja, atau iuran pekerja.

Dalam *profit sharing* pengertian keuntungan (*profit*) yang akan di bagikan kepada pekerja harus didefinisikan dengan jelas dalam dokumen program untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Secara teori, keuntungan bersih setelah pajak (*net profit after tax*) merupakan ukuran yang baik dan dapat diterima. Karena keuntungan dalam bisnis mengandung ketidakpastian, maka iuran maupun manfaat pensiun dalam *profit sharing* tidak dapat di pastikan.

b) *Money purchase pension plan* (MPPP)

MPPP merupakan program pensiun iuran pasti yang banyak dipakai oleh perusahaan /pemberi kerja berskala kecil yang ingin memberikan jaminan manfaat pensiun kepada pekerjanya, tetapi tidak bersedia menanggung kewajiban keuangan seperti dalam program manfaat pasti. Dalam MPPP, iuran peserta berdasarkan pada rumusan tetap di tuangkan dalam dokumen program. Biasanya, rumusan iuran untuk MPPP merupakan presentase tetap atas kompensasi pekerja, misalnya 5% atau 10% tiap tahunnya. Salah satu ragam MPPP yang mirip dengan program pensiun manfaat pasti adalah *target benefit plan*. Dalam program itu, iuran pemberi kerja dihitung secara aktuarial oleh seorang aktuaris untuk mencapai target manfaat

berdasarkan asumsi-asumsi aktuarial. Meskipun demikian, pekerja tetap menanggung risiko investasi.

c) *Thrift and saving plan*

Thrift and saving plan masyarakat peserta membayar iuran selain iuran dari perusahaan / pemberi kerja. Sedangkan bila pemberi kerja tidak memberikan iuran pada program pensiun iuran pasti, maka disebut *purethrift plan*. Beberapa keuntungan *thrift* adalah :

1. Kemudahan dan disiplin menabung bagi pekerja melalui pemotongan gaji, sehingga memungkinkan pekerja menabung secara sistematis
2. Dana yang terakumulasi memberikan manfaat karena dikelola oleh profesional yang sering kali gratis karena beban pengelolaan ditanggung oleh pemberi kerja. Selain itu, pekerja menikmati diversifikasi investasi yang lebih luas seperti dalam reksa dana.
3. Bila program memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka hasil investasi yang dikreditkan kepada pekerja bukan merupakan objek pajak.

d) *Stock Bonus Plan*

Stock bonus plan merupakan program yang dijalankan oleh pemberi kerja dimana manfaat pensiun yang dibagikan berupa saham (*stock*) perusahaan. Pemberi manfaat dalam bentuk uang menjadi pertimbangan bila peraturan yang ada tidak memperbolehkan kepemilikan secara substansial atas saham

pemberi kerja yang dibagikan belum di perjual belikan di bursa, pekerja / pserta harus dilengkapi dengan hak untuk menjual saham kepada perusahaan / pemberi kerja dengan harga yang wajar (*put option*).

e) *Equity stock ownership plan (ESOP)*

Esop merupakan program pensiun iuran pasti yang berinvestasi dalam instrument saham pemberi kerja. Iuran di dasarkan pada keuntungan atau kompensasi pekerja dalam bentuk uang atau saham. Jika iurannya dalam bentuk uang, maka sebagian atau seluruhnya di gunakan untuk membeli saham perusahaan baik langsung dari pemberi kerja atau melalui bursa saham. Deviden bisa di bagikan kepada pekerja dalam bentuk uang atau dipakai. Sebagai tambahan iuran untuk membeli saham tambahan. Suatu ESOP yang menggunakan utang untuk membeli saham perusahaan pemberi kerja disebut *leverage ESOP*, sedangkan suatu ESOP di mana sebelumnya pemberi kerja menerima kredit pajak disebut *tax-credit ESOP* atau *TRASOP*.

Tujuan pengaturan program imbalan pasti diatas adalah untuk mendapatkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji di dasarkan pada manfaat purnakarya terjanji dalam persyaratan program manfaat purnakarya atas jasa yang diberikan sampai pada tanggal manfaat purnakarya dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi dengan mengungkapkan dasar yang digunakan. Dampak dari setiap perubahan asumsi

aktuarial yang mempunyai dampak signifikan pada nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji juga diungkapkan.

Laporan keuangan menjelaskan hubungan antara nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji dan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan kebijakan pendanaan manfaat purnakarya terjanji.

Dalam program imbalan pasti, pembayaran dana pensiun terjanji tergantung pada posisi keuangan program purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional purnakarya.

Program manfaat dana pensiun membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menilai kondisi keuangan program manfaat purnakarya, menelaah asumsi, dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan.

Tujuan pelaporan untuk dana pensiun adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan aktivitas dana pensiun yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. Tujuan ini biasanya dapat di capai dengan menyusun laporan keuangan yang antara lain terdiri atas :

- 1) Penjelasan atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat purnakarya serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya
- 2) Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama

selama periode dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada ahir periode:

- 3) Informasi aktuarial sebagai bagian dari laporan tersebut atau sebagai laporan terpisah; dan
- 4) Penjelasan atas kebijakan investasi

Berdasarkan penyedia jasa, jenis dana pensiun dibedakan menjadi program pensiun swasta (*private pension plan*) dan program pensiun pemerintah (*public pension plan*)

a. Program pensiun swasta

Program pensiun swasta di sponsori oleh perusahaan pemberi kerja grup, atau individu. Pemerintah terhadap program pensiun ini semakin meningkat karena masyarakat semakin sadar akan kesejahteraan jangka panjang. Dengan karakteristik sumber dana yang relatif stabil karena kontrak bersifat jangka panjang dan probabilitas terjadinya risiko yang relative dapat diprediksi karena hanya berhubungan dengan satu kejadian, yaitu pensiun/kematian maka alokasi dana pensiun sebagian besar diinvestasikan ke dalam instrument jangka panjang.

b. Program pensiun pemerintah

Program pensiun pemerintah di sponsori oleh pemerintah dengan system pendanaan "*pay as you go*" dana yang terkumpul sekarang dari mereka yang bekerja, di pakai untuk mereka yang pensiun sekarang. Sistem pendanaan demikian potensional mengalami underfunded, yaitu dana yang terkumpul tidak cukup membayar mereka yang pensiun. Hal mungkin terjadi bila pada masa yang lampau terjadi peledakan penduduk (*baby boom*), seperti yang terjadi di AS antara tahun 1946-

1964. Hal yang sama terjadi juga di Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut telah mendorong pemerintah untuk mengubah struktur pendanaa dengan meningkatkan program-program *benefit*, selain melakukan privatisasi.

E. Asas-Asas Dana Pensiun

Menurut undang–undang nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan dana pensiun didasarkan pada 5 (lima) asas pokok. Asas –asas adalah sebagai berikut:

1. Asas keterpisahan dana pensiun dari kekayaan dana pendirinya.

Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun, dan diurus serta dikelola berdsarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun yang terutama tersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

2. Asas Penyelenggaraan dalam System Pendanaan.

Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah di lakukan dengan pemupukan dana yang di kelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian berdasarka undang-undang ini pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak di perakenankan.

3. Asas pembinaan dan pengawasan.

Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan kepentingan yang dapat

mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.

4. Asas penundaan manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun

Berdasarkan asas ini keputusan membentuk dana pensiun merupakan perkara pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa di bubarkan.

F. Akuntansi Dana Pensiun Menurut PSAK No.18

Menurut Wardhani (2015:13) Laporan keuangan dana pensiun sesuai PSAK 18 sebagai berikut:

1. Laporan keuangan program iuran pasti berisikan laporan asset neto tersedia untuk pelaporan dana pensiun pada BTPN dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.

Tujuan pelaporan program iuran pasti dengan menyusun laporan, antara lain terdiri atas:

- a) Penjelasan atas kegiatan signifikan pelaporan akuntansi keuangan pada BTPN selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan terkait dengan program tersebut, keanggotaan, syarat, dan kondisi.
- b) Pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program purnakarya pada akhir periode pelaporan.
- c) Penjelasan atas kebijakan investasi

2. Nilai Kini aktuarial dari manfaat dana pensiun terjanji

Nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh para pihak perusahaan yang dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan masa dana pensiun peserta.

Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji kini antara lain:

- a) nilai kini aktuarial atas manfaat dana pensiun terjanji, merupakan penjumlahan dari seluruh gaji saat ini dapat distribusikan ke setiap peserta dalam program manfaat purnakarya, dapat dihitung lebih obyektif dari pada tingkat gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi;

- b.) peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan ke dalam kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat purnakarya pada saat kenaikan gaji; dan
- c.) jumlah nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji menggunakan tingkat gaji kini yang secara umum lebih terkait erat dengan jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program dana pensiun.

Alasan di yang diberikan untuk menerapkan pendekatan proyeksi gaji adalah sebagai berikut:

- 1) informasi keuangan seharusnya di sajikan atas dasar kelangsungan usaha, terlepas dari asumsi-asumsi dan setimasi yang harus dibuat dari perusahaan BTPN
- 2) pada akhir pembayaran program manfaat purnakarya, manfaat ditentukan dengan mengacu pada gaji saat atau mendekati tanggal purnakarya; oleh karena itu gaji, tingkat iuran dan tingkat pengembalian harus diproyeksikan; dan
- 3) kesalahan untuk tidak memasukkan proyeksi gaji (sementara sebagian besar pendanaan didasari oleh proyeksi gaji) hal ini dapat mengakibatkan pelaporan pendanaan tampak berlebih tapi nyatanya tidak atau pendanaan terlihat cukup memadai tapi nyatanya kurang

Nilai kini aktuarial atas penerapan standar keuangan terjanji yang berdasarkan gaji kini, diungkapkan dalam laporan keuangan program penerapan standar yang akan di lakukan pada BTPN untuk menunjukkan kewajiban manfaat yang diterima pada tanggal pelaporan keuangan. Nilai kini aktuarial dana pensiun terjanji berdasarkan proyeksi

gaji diungkapkan untuk menunjukkan besarnya kewajiban potensial dengan dasar kelangsungan usaha sebagai dasar umum untuk pendanaan, sebagai tambahan atas.

Pengungkapan nilai kini aktuarial atas dana pensiun BTPN terjanji, penjelasan memadai juga dibutuhkan untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas dalam konteks bagaimana menyajikan nilai kini aktuarial atas dana pensiun terjanji. Penjelasan tersebut dapat berbentuk informasi tentang kecukupan pendanaan masa depan untuk dana pensiun dan kebijakan pendanaan berdasarkan proyeksi gaji. Hal ini dimasukkan dalam laporan keuangan atau laporan aktuarial.

1. Penilaian Aktuarial

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang bersangkutan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

Pada penerapan PSAK maka dapat memberikan informasi, informasi disajikan dalam salah satu format berikut, yang mencerminkan perbedaan praktek pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:

- a. Suatu laporan dimasukkan dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk pelaporan dana pensiun, nilai kini aktuarial atas dana pensiun terjanji, dan hasil *surplus* atau defisit. Laporan keuangan penerapan standar keuangan pada BTPN ada juga berisi laporan perubahan aset neto tersedia dana pensiun dan perubahan nilai kini aktuarial atas penerapan standar

keuangan terjanji. Laporan keuangan dapat disertai laporan aktuaris terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial atas pelaporang keuangan pada BTPN.

- b. laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk laporan keuangan dan laporan perubahan aset tersedia untuk manfaat dana pensiun. Nilai kini aktuarialitas dana pensiun terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai laporan aktuaris yang mendukung nilai kini aktuarialitas atas manfaat dana pensiun terjanji; dan
 - c. laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat dana pensiun dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat dana pensiun dengan menggunakan nilai kini aktuarialitas atas manfaat dana pensiun terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah. Pada setiap bentuk laporan wali amanat yang bersifat laporan manajemen atau direksi dan laporan investasi dapat dilampirkan dalam laporan keuangan.
2. penilaian asset dana pensiun

Investasi program dana pensiun harus diakui pada nilai wajar. Pada kasus surat berharga yang diperdagangkan, maka nilai wajar adalah nilai pasar. Pada investasi pada penerapan standar pelaporan dana pensiun yang dimiliki seandainya estimasi nilai wajar tidak mungkin, maka pengungkapan harus dibuat berisi alasan mengapa nilai wajar tidak dapat digunakan.

Dalam kasus surat berharga yang diperdagangkan pada nilai wajar biasanya menggunakan nilai pasar karena dianggap sebagai

nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai surat berharga pada tanggal pelaporan dan kinerja investasi selama periode tersebut.

Surat-surat berharga yang nilai jatuh temponya sudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk membayar pelaporan dana pensiun, atau bagian yang spesifik dari setiap manfaat dana pensiun, dinilai berdasarkan nilai jatuh temponya dengan asumsi tingkat pengembalian yang tetap.

Laporan dana pensiun pasti terdiri atas:

1. *Aset neto* tersedia untuk dana pensiun

Laporan *asset neto* tersedia untuk dana pensiun termasuk adalah satu dari:

- a) Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuari atas laporan keuangan pada BTPN terjanji, yang membedakan antara pelaporan yang sesuai atau telah dan Referensi atas informasi *asset neto* tersedia untuk manfaat dan pelaporan yang belum sesuai dengan pelaporan
- b) Pengungkapan

Laporan keuangan dana pensiun yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti berisi informasi mengenai:

- (1) Laporan perubahan *asset neto* tersedia untuk pelaporan keuangan Ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan dan
- (2) Penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh setiap perubahan laporan keuangan selama periode tersebut.

Laporan keuangan di sediakan oleh program dana pensiun meliputi:

- a. Laporan *asset neto* tersedia untuk mendapat dana pensiun yang diungkap
 - 1) Asset pada akhir priode bersangkutan sesuai klasifikasi
 - 2) Dasar nilai asset Rincian setiap investasi tunggal melebihi 5% dari asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga
 - 3) Rincian setiap investasi pemberi kerja
 - 4) Labilitas kecuali nilai kini aktuari atas manfaat purnakarya terjanji
- b. Laporan perubahan asset neto tersedia untuk dana pensiun menyajikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Iuran pemberi kerja
 - 2) Iuran karyawan
 - 3) Pendapatan investasi seperti bunga dan deviden
 - 4) Pendapatan lain-lain
 - 5) Manfaat yang di bayarkan dan terutang
 - 6) Beban administrasi
 - 7) Beban lain-lain
 - 8) Pajak penghasilan
 - 9) Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi
 - 10) Transfer dari dan untuk program purnakarya lain
- c. Pembentukan dana pensiun harus memenuhi beberapa asas yaitu:
 - 1) Keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya

- 2) Penyelenggaraan dalam system pendanaan
- 3) Pembinaan dan pengawasan

G. Akuntansi untuk Pensiun

Kewajiban pensiun (*pension obligation*) pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang di tangguhkan kepada para karyawannya atas jasa-jasa mereka menurut persyaratan dalam program pensiun. Jenis-jenis ukuran kewajiban pensiun:

1. Tunjangan terjamin (*vested benefit*) adalah tunjangan yang berhak diterima karyawan sekalipun karyawan tersebut tidak memberikan jasa tambahan dalam program. Sebagian besar program pensiun masyarakat seorang karyawan harus memiliki masa kerja minimum sebelum mencapai status tunjangan terjamin.
2. Akumulasi kewajiban tunjangan adalah perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada seluruh tahun masa kerja yang di jalani karyawan setelah mengikuti program baik yang terjamin maupun yang tidak terjamin dengan menggunakan tingkat gaji yang belaku sekarang.
3. Proyeksi kewajiban tunjangan adalah nilai sekarang tunjangan yang terjamin dan yang tidak terjamin diakrualkan sampai dengan tanggal sekarang berdasarkan tingkat gaji masa depan karyawan. Akan tetapi dimungkinkan juga untuk menggunakan akumulasi kewajiban tunjangan dalam situasi-situasi tertentu. Pendekatan dalam akuntansi untuk program pensiun:
 - a) Pendekatan non kapitalisasi

Terjadinya nonkapitalisasi karena neraca melaporkan asset atau kewajiban untuk perjanjian program pensiun hanya jika jumlah yang benar-benar didanai selama suatu tahun oleh pemberi kerja berbeda.

Dengan jumlah yang dilaporkan oleh pemberi kerja sebagai beban pensiun tahun berjalan. Hal ini juga sering disebut sebagai pembiayaan di luar neraca (*off balance sheet financing*).

b) Pendekatan kapitalisasi

Pendekatan ini mengukur dan melaporkan asset dan kewajiban pensiun perusahaan dalam laporan keuangan. Kapitalisasi lebih mementingkan substansi ekonomi dari perjanjian program pensiun dari pada bentuk hukumnya.

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Agung Sri Wardhani, Bambang Herwanto Jurnal Bisnis Terapan Volume 1. No. 2	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)	Deskriptif Kualitatif	Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Surabaya pada tahun 2013-2015 telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18. Hal tersebut menandakan bahwa Pengelola Dana Pensiun Universitas Surabaya telah mematuhi peraturan perundang-undang anyang berlaku baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan PSAK

No	Peneliti Tahun	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
				No. 18 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.
2	Lusiana lin Puspitasari1 Agus Tony Poputra (2016): Jurnal Emba 231 Vol.4 No.1	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada Pt. Bank Negara Indonesia(Persero)	Deskriptif Kualitatif	menunjukkan proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18. Sebaiknya pimpinan bank BNI dapat Nomor 18. mempertahankan kredibilitas penyusunan Laporan keuangan, agar tetap konsisten sesuai dengan PSAK
3	Muhammad Fahmi Tanjung, Wahyu Ario Prartomo(2013): Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.1,No.4	Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pns Pensiunan Guru Kota Medan	Deskriptif Komparatif	Pemenuhan kebutuhan pokok pensiun untuk pangan dengan menggunakan nilai rata-rata dari komponen kebutuhan pangan sebanyak 47 responden (94%) terpenuhi dan sebanyak 3 responden (6%) cukup terpenuhi.
4	Yuli Andriani,Ensiwi Munarshi (2010): Jurnal Penelitian Sains Vol.12 No.2	Perhitungan Dana Pensiun Untuk Pensiun Normal Berdasarkan Metode <i>Constant Dollar</i> Studi Kasus PT.Taspen Palembang	Model Regresi Sederhana	Pada pesiun normal besarnya nilai sekarang mantaaf masa depan seseorang dengan usia masuk kerja sama dengan nilai sekarang iuran pensiunnya
5	Jevita Mercy Rengkung,Lintje Kalangi(201): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15 No.3	Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Pada PT.PLN Wilayah Suluttenggo	Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan prosedur pencatatan potongan iuran pensiun sesuai dengan teori,dan pelaporan potongan iuran pensiun dengan benar sesuai dengan PSAK NO.24 revisi 2010 tentang imbalan kerja.
6	A.A.N.B. Dwiranda(2010):Jurnal Ekonomi Dan	Kecukupan Psak 18 Tentang Akuntansi Dana Pensiun	Metode Analisis Data: Deskriptif	Sangat terbuka dengan peluang untuk melakukan kajian terkait dengan PSAK ini,seperti: pengkajian

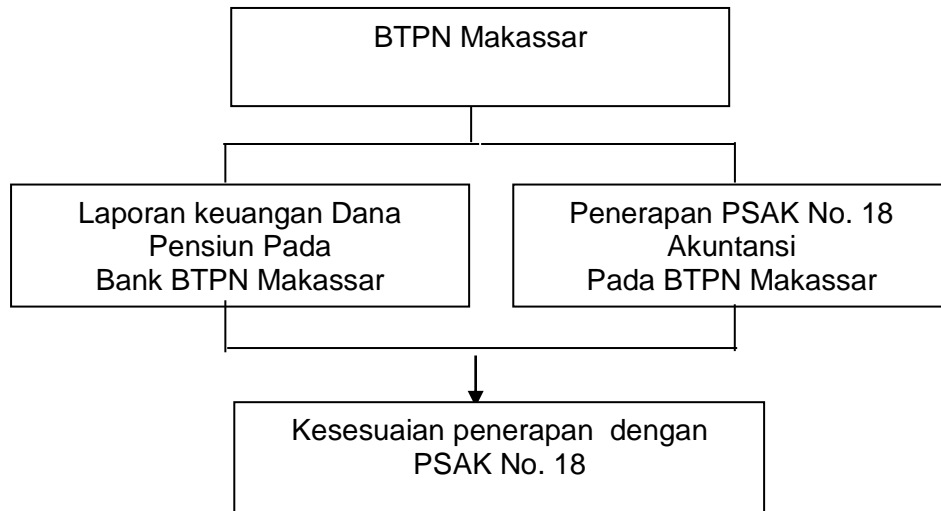
No	Peneliti Tahun	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	Bisnis Vol 10.No 3	Dalam Mengakomodasi Kebutuhan Standar Akuntansi Investasi Tanah Dan Bangunan		terhadap akun iuran dan manfaat pensiun selisih penilaian investasi,kewajiban aktuarial, dan selisih kewajiban aktuarial.
7	Wahyu Efendi (2014) :Artikel Ekonomi Bisnis	Analisis Penerapan Psak No. 18 Mengenai Dana Pensiun Pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Dengan penerapan yang di gunakan sudah memenuhi standar akuntansi yang telah di terapkan dan sesuai dengan psak no.18
8	Kurnia Agustina Anggraeni (2012): Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 1 No. 11	Analisis Kinerja Keuangan Dan Rasio Kecukupan Dana Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Manfaat Pasti Di Indonesia	Analisis Data: Analisis Rasio	Variabel ROI (<i>Return On Investment</i>) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan yang ditunjukkan dengan keadaan yang lebih baik pada dana pensiun dengan RKD ST dengan tingkat signifikansi 0,000,
9	Nussy (2014): Jurnal Bisnis Terapan vol.1 No.1	Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pension Pada PT.Taspen Cabang Manado	Deskriptif Kualitatif	Pelaporan yang di lakukan dalam penelitian ini telah sesuai pelaporan yang berlaku dengan psak yang berlaku
10	Putri Pertiwi (2016): artikel ekonomi bisnis	Analisis Penerapan Psak No 18 Dana Pensiun Pada Bank Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Dengan penerapan yang di gunakan sudah memenuhi standar akuntansi yang telah di terapkan dan sesuai dengan psak no.18

I. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori yang telah di kemukakan di atas dapat di ketahui bahwa penerapan PSAK No 18 mengenai akuntansi dana pensiun dan laporan keuangan dana pensiun pada BTPN Makassar maka di dalam BTPN dana pensiun yang terdapat di BTPN Makassar, maka semua pihak dalam

perusahaan dana pensiun adalah Badan hukum yang mengelola bisnis dan menjalankan program-program inovasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga dalam menjalankan semua bisnisnya maka dapat memberikan arti lebih kepada masyarakat sehingga mendukung kesuksesan pengusaha mikro dan kecil di Indonesia tidak hanya melalui pinjaman dana namun juga melalui pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam upaya menumbuhkan kualitas usaha, di mana dalam program pemberdayaan elemen yang terintegrasi dengan modal bisnis dalam seluruh produk aktivitas.

Dana pensiun senantiasa berusaha untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti bagi seluruh nasabah BTPN. Sehingga dalam laporan keuangan dana pensiun di BTPN Makassar apakah penyajiannya sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang akuntansi dan laporan keuangan program dana pensiun khususnya PSAK No. 18 dan juga bagaimana pengelolaan investasi dan kinerja investasi dari dana pensiun BTPN Makassar apakah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku. Jika pada kondisi akhir-akhir didapatkan bahwa PSAK No. 18 berpengaruh terhadap laporan keuangan pada BTPN Makassar, maka dapat dinyatakan telah sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dalam hal ini peneliti bertujuan untuk membuktikan penerapan standar akuntansi dana pensiun pada Bank BTPN Makassar dan juga menganalisis kembali data-data yang di kelola pada perusahaan bank BTPN Makassar bahwa apakah pelaporan dana pensiun telah sesuai dengan sistem atau standar pelaporan PSAK NO. 18, karena dalam hal ini sangat penting untuk pengumpulan data yang akan di teliti selanjutnya.

B. Fokus Penelitian

Penelitian fokus pada kesesuaian penerapan dana pensiun yang diterapkan oleh Bank BTPN Makassar dengan PSAK nomor 18

C. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank BTPN (Bank Tabungan Dana Pensiun) Jln. Gunung Bawakaraeng Makassar, Sulawesi selatan. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan.

D. Sumber Data

- a. Data primer data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dari perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan Bank BTPN Makassar.
- b. Data sekunder data yang diperoleh berupa dokumentasi dan wawancara pada Bank BTPN Makassar PSAK No. 18.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini,ada beberapa hal yang penulis lakukan, yaitu :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan pedoman, serta dimaksudkan untuk menggali dan menemukan data-data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang berkaitan dengan seluruh penerapan akuntansi dana pensiun.

2. Wawancara atau interview

Pengumpulan data lapangan dengan cara melakukan wawancara observasi pada obyek penelitian dan melakukan wawancara dengan pimpinan, staf, dan karyawan perusahaan untuk mendapatkan data yang di perlukan.

3. Dokumentasi

Penulis mengambil data dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang di miliki perusahaan. Teknik ini di gunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan, prosedur, dan pengendalian intern perusahaan. Peneliti mengumpulkan data tentang penerapan PSAK No. 18 mengenai akuntansi dana pensiun terhadap laporan keuangan dana pensiun BTPN Jln. Gunung Bawakaraeng Makassar.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian menggunakan suatu metode yaitu metode wawancara

1. Teknik Analisis

Analisa data dilakukan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data kemudian disusun dengan diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang penerapan PSAK terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun BTPN Makassar sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun dan adapun tahap yang dilakukan dalam teknik penelitian ini yaitu :

- 1) Mengumpulkan data di mana pada tahap ini yang dilakukan dengan memperoleh data-data yang ada pada perusahaan mulai dari data pada karyawan sampai kepada pimpinan perusahaan.
- 2) Verifikasi data-data di mana pada tahap ini data yang diperoleh di periksa kembali sehingga dapat diketahui bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan standar pelaporan akuntansi.
- 3) Penyajian data di mana pada tahap ini data yang telah di verifikasi kemudian di susun dengan sebaik-baiknya dan di buat dalam bentuk apakah berupa tabel atau daftar sehingga dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- 4) Kesimpulan pada tahap ini dimana data yang diperoleh di susun dengan rapi dan di periksa kembali sehingga akan disimpulkan bahwa pada dasarnya apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan standar pelaporan PSAK NO.18. dan pada kesimpulannya data yang diperoleh telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan PSAK NO 18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat PT.Bank BTPN Makassar

Bank Tabungan Pensiunan Nasional terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1985 di Bandung. Ketua serangkai tersebut kemudian mendirikan perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya di sebut "BAPEMIL ") dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun Sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir.

Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT Bank Tabungan Pensiun Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL.

Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan (sebagaimana selanjutnya dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu :

Bank perkreditan rakyat, maka pada tahun 1993 status bank Tabungan Pensiun Nasional diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank Tabungan Pensiun Nasional tersebut telah mendapat persetujuan dari bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No.26/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status perseroan sebagai bank umum.

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank Tabungan Pensiunan Nasional memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada Nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah para pensiunan`

Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank Tabungan Pensiunan Nasional bekerja dengan PT Taspen, sehingga Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak saja dapat memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan "Tri Program Taspen", yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran Uang Pensiun.

2. Visi, Misi dan tujuan organisasi

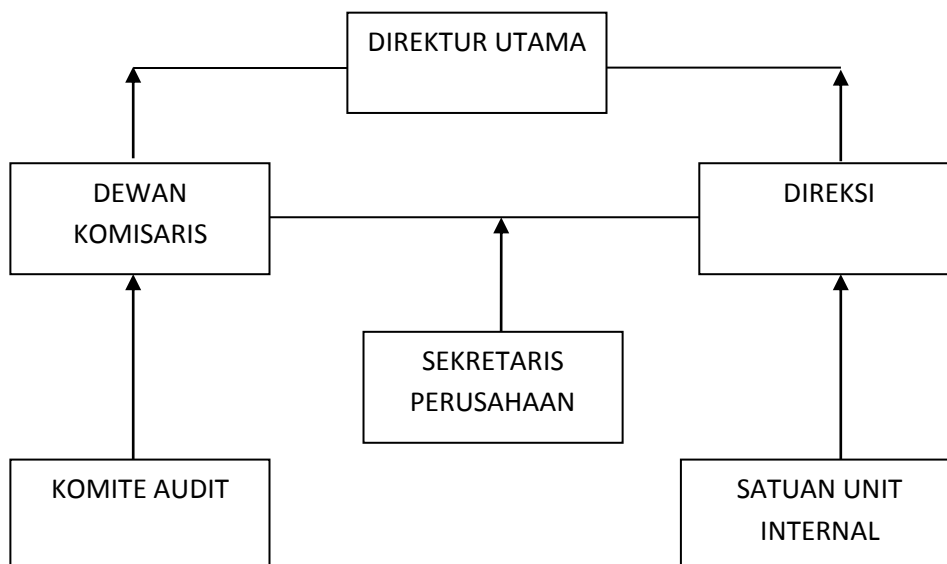
a. Visi :

Menjadi penyedia jasa keuangan retail yang terpilih dan penuh kepada kepedulian di Indonesia.

b. Misi :

- 1) Melaksanakan Good Corporate Govenance (GCG) di setiap pengoprasian bisnis Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
- 2) Menyediakan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan bisnis Bank Tabungan Pensiunan Nasional kepada nasabah kami.
- 3) Menjamin keamanan, kepercayaan dan kemudian akses bagi nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional melalui penggunaan teknologi mutakhir di setiap pengoprasian bisnis kami.

B. Struktur Organisasi dan Job Description



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dana Pensiun PT.Bank BTPN

Dengan susunan berikut :

Adapun perincian tugas (fungsi) dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan dapat di jelaskan satu persatu berikut ini :

1. Direktur Utama

- a. Direksi bertanggung jawab untuk menjamin berlangsungnya operasinal Bank
- b. Menciptakan pengawasan internal yang efektif dan efisien
- c. Memantau serta mengelola risiko yang di hadapi Bank,
- d. Memelihara iklim yang mendukung terciptanya produktivitas,
- e. Mengelola sumber daya manusia, menjaga profesionalisme
- f. Menyampaikan laporan tentang kinerja Bank secara menyeluruh kepada para pemegang saham di dalam RUPS.

2. Dewan direksi

- a. memberikan pengarahan dan nasehat kepada direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan.
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan Rrapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengikuti perkembangan perusahaan sedang dalam masalah.
- e. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan strategis perusahaan, rencana perkembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan.

3. Direksi
 - a. Melakukan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan
 - b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik
 - c. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab, direksi wajib Menyusun rencana pengembangan perseroan dan rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
4. Komite audit
 - a. Pengawasan terhadap laporan keuangan
 - b. Pengawasan terhadap proses audit
 - c. Pengawasan terhadap implementasi *good corporate governance*
5. Satuan unit internal
 - a. Membantu direktur utama dalam menyelenggarakan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan serta memberi saran perbaikan
 - b. Sebagai mitra strategic unit kerja dalam mencapai sasaran usaha
 - c. Sebagai konsultan bagi peningkatan pengelolaan resiko
 - d. Sebagai mitra kerja dari komite audit dan auditor eksternal
6. Sekretaris perusahaan
 - a. Memfilter informasi dari sumber informasi bagi pimpinan dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab
 - b. Mengatur aktivitas perusahaan
 - c. Menjadi mediator pemimpin dengan bawahan
 - d. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan

- e. Membrikan ide-ide sebagai alternative pemikiran pemimpin Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan perusahaan

C. Hasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kajian teori dan hasil penelitian yang diuraikan, maka pada sub bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitiannya melalui wawancara langsung dengan informan yaitu Direktur dana pensiun Bank BTPN Makassar. Dan pada bab ini juga akan disajikan hasil penelitian terhadap metode komparatif yang bersifat membandingkan. Untuk keakuratan data mengenai informan maka diperlukan penjelasan mengenai data informan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Data Informan

NO	Nama Responden	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
1	Drs.Danny MM	Laki-Laki	51	Direktur
2	Firmawaty Dahlan	Perempuan	32	Supervisor

Peneliti kemudian melakukan wawancara dan observasi langsung pada PT.Bank BTPN atau Direktur dana pensiun BTPN dengan menggunakan data yaitu data kategorisasi berdasarkan pertanyaan penelitian. Namun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara perlu dilakukan pemahaman untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dari itu harus diuraikan terlebih dahulu mengenai pengelolaan dana pensiun pada PT.Bank BTPN Makassar. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pencatatan dan

pelaporan dana pensiun pada PT.Bank BTPN dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.18

1. Jenis dana pensiun yang diterapkan pada PT.Bank BTPN

Program dana pensiun yang umumnya di pakai di perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara ataupun karyawan pemerintah terdiri dari atas dua yaitu program pensiun manfaat pasti dan program iuran pasti.

Program pensiun manfaat pasti atau sering di sebut *defined benefid plan* adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan di terima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Berdasarkan dasar formula manfaat tersebut,besarnya iuran yang akan diperlukan dihitung oleh aktuaris. Perbandingan iuran karyawan dan pemberi kerja lebih besar dari iuran karyawan. program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dan pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Perusahaan pada umumnya termasuk PT.Bank BTPN yang menjadi hal utama yaitu karyawannya dalam kondisi memberikan kinerja yang baik sehingga strategi perusahaan dalam hal SDM (sumber daya manusia) bagaimana karyawan dapat berkinerja secara maksimal. Karyawan dapat berkinerja maksimal selain dari ilmu pengetahuannya, semangat dan karyawan juga harus dalam kondisi tidak khawatir akan jaminan kehidupannya di masa tua. Maka dengan tujuan tersebut, PT.Bank BTPN membentuk dana pensiun

Maka dari itu peneliti mengajukan pertanyaan dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada informan yang merupakan direktur dana

pensiun PT.Bank BTPN yaitu bapak Drs.Danny.MM adapun pernyataan yang diberikan yaitu:

Bapak Drs.Danny.MM mengatakan bahwa :

“Pada dana pensiun PT.Bank BTPN Makassar diterapkan jaminan pensiunan manfaat pasti yang diperoleh setiap bulannya kepada para pensiunan. Besaran yang diterima oleh para pensiunan PT.Bank BTPN sesuai dengan rumus jaminan manfaat pasti yaitu $MK \times 2\% \times phDP$. Dimana MK masa kerja dan phDP yaitu penghasilan dasar pensiun”

Maksud dari keterangan informasi yang di berikan bapak Drs.Danny.MM diatas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin,18 september 2018 bahwa pada dana pensiun PT.Bank BTPN menerapkan program dana pensiun manfaat pasti yang diterima setiap bulan sesuai besaran yang telah ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan dan penghasilan dasar pensiun yang perhitungannya sesuai dengan rumus yang ditetapkan

2. Landasan Peraturan Dana Pensiun Pada PT.Bank BTPN

Pada umumnya perusahaan memiliki orientasi profit, sedangkan pada dana pensiun PT. Bank BTPN orientasinya bukanlah orientasi profit melainkan bagaimana menjaga kewajiban dana pensiun sama dengan kekayaannya yaitu untuk memastikan bahwa para karyawan baik yang telah pensiun maupun yang masih bekerja atau yang menjadi peserta itu tersedia dana untuk membayarkan manfaat pensiunnya secara tepat jumlah dan tepat waktu setiap bulan.

3. Besar iuran peserta dana pensiun PT.Bank BTPN

Iuran terbagi atas dua yaitu iuran dari karyawan dari penghasilan dasar pensiun dan iuran dari diri sendiri dalam hal ini PT.Bank BTPN yang terbagi atas dua yaitu yang pertama jika kekayaan dana pensiun lebih kecil d ibanding kewajibannya maka dana pensiun itu mengalami *unfandead* (tidak

terbayar),kekayaan itu tidak cukup untuk membiayai kewajibannya. Hal tersebut memiliki konskuensi yaitu pendiri dalam hal ini PT.Bank BTPN memiliki iuran normalnya dan juga harus ditambah iuran tambahan. Dalam hal ini iuran tambahan di peroleh dari jumlah unfandead /180 bulan yang harus dibayar. Penerapan PSAK NO 18 terhadap laporan keuangan dana pensiun PT.Bank BTPN

Mengingat bahwa dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha disusun berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku khusus dana untuk pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan yaitu penerapan standar akuntansi keuangan NO.18

Menurut UU NO.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sebagai suatu badan hukum,dana pensiun bertanggung jawab menghimpun dan mengelola dana milik peserta program pension pada PT.Bank BTPN

4. Usia peserta dana pensiun PT.Bank BTPN

Peserta merupakan setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun.pasal 19 Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun,yang didirikan oleh pemberi kerja berhak menjadi peserta.

5. Dana pensiun yang akan diterima akan dikenakan pajak

Permasalahan perpajakan dalam hubungan dengan dana pensiun adalah perbedaan perlakuan pajak antara dua jenis bentuk penghasilan yaitu uang pesangon dan manfaat pensiun. Pada dasarnya uang pesangon diberikan kepada pegawai yang belum memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat. Iuran pensiun yang di tanggung oleh pemberi kerja dapat dibebankan sebagai pengurang pajak oleh perusahaan. Sementara manfaat pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiun yang iurannya dibayar oleh karyawan tersebut.

6. fungsi dana pensiun

Sebelumnya kami peneliti mengajukan pertanyaan dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada informan yang merupakan supervisor dana pensiun PT.Bank BTPN yaitu ibu Firmawati Dahlan adapun pernyataan yang diberikan yaitu:

Ibu Firmawati Dahlan mengatakan bahwa :

Fungsi dana pensiun itu adalah sebagai tabungan untuk masa tua peserta dana pensiun pada bank BTPN Makassar namun adapun tujuannya yaitu :

1. fungsi asuransi, program program pensiun memiliki memiliki fungsi asuransi karena memeberikan jaminan kepda peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun.
2. fungsi tabungan, untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta.
3. fungsi pensiunan, manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup

1. Penyusunan laporan keuangan dana pensiun

Tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan dana pensiun dalam suatu periode tertentu kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya pendiri, peserta, pengurus dan departemen keuangan.

Berdasarkan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan bulanan otoritas jasa keuangan (OJK) terdiri :

- a. Laporan asset neto
- b. Laporan perubahan asset neto
- c. Neraca (laporan posisi keuangan)
- d. Laporan hasil keuangan
- e. Laporan arus kas

Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan NO.18 Tahun 2015 laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat pemakarya mencakup hal-hal berikut:

- a. Laporan asset neto tersedia untuk manfaat pemakarya yang mengungkap
- b. Asset pada akhir periode sesuai klasifikasinya
- c. Dasar penilaian asset
- d. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari asset neto tersedia untuk manfaat pemakarya atau 5% untuk kelompok atau jenis efek
- e. Rincian setiap investasi pada pemberi kerja
- f. Liabilitas selain nilai kini actuarial dari manfaat pemakarya terjanji

Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pemakarya yang menunjukkan hal-hal berikut :

- a. Luran pemberi kerja

- b. Iuran pekerja
- c. Penghasilan investasi seperti bunga dan deviden
- d. Penghasilan lain
- e. Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis, sebagai contoh sebagai manfaat prnakarya, kematian dan cacat serta pembayaran *lump sum*)
- f. Beban administrasi
- g. Beban lain
- h. Pajak penghasilan
- i. Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi
- j. Pengalihan dari dan kepada program purnakarya lain

2. Dana Pensiun Bank BTPN

Realisasi data keputusan kepesertaan merupakan salah satu informasi penting bagi aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuaria. Oleh karena itu, kelengkapan dan kendalannya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam menjalankan tugas pengelolaannya, pengurus bekerja berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. BTPN mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pensiun yakni membayar manfaat Pensiun tepat kepada yang berhak, tepat jumlah dan tepat waktu serta berupaya terus menumbuh kembangkan dana investasi. Pengelolaan profolio investasi bank BTPN senantiasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) dengan tetap berupaya mendapatkan hasil investasi yang optimal. Data jumlah peserta dalam program pensiun terdiri sebagai berikut

- 1. Ralisasi peserta
 - a. Jumlah peserta

- b. Peserta dibedakan dalam dua kelompok
2. Peserta aktif, yaitu peserta yang masih aktif bekerja dan menjadi peserta dana pensiun
- a. Peserta pasif terdiri dari :
 - 1) Pensiun di tunda yaitu peserta yang telah berhenti bekerja tetapi ditunda pembayaran manfaat pensiunnya
 - 2) Penerima pensiun
 - 3) Jumlah peserta per 31 desember 2014 sebanyak 20.000 orang.
 - b. Profil Pensiun Berdasarkan Usia
 - 1) Jangka waktu menurut usia dari usia 25 s/d 63 tahun maksimal jangka waktu 10 tahun di atas usia 63 tahun
 - 2) Suku bungan fluktuatif disesuaikan dengan keadaan pasar
 - 3) Pensiun yang bisa di layani :
 - (a) Pensiun sipil dengan jandanya
 - (b) Pensiun ABRI dengan jandanya
 - (c) Pensiun veteran dengan tunjangan
 - (d) Pensiun BUMN dengan jandanya
3. Untuk pensiun veteran maksimal jangka waktu pinjaman 2 tahun di sesuaikan dengan umur yang meminjam bila umur lebih dari 74 tahun makam pinjaman tidak tersedia di berikan
4. Penerimaan Iuran Normal Dan Pembayaran Masa Manfaat Pensiun

Penerimaan iuran normal adalah sebesar Rp 104 milyar dan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp 633 milyar. Penerimaan iuran semakin berkurang karena

tidak ada penambahan peserta baru. Sedangkan jumlah pembayaran manfaat pensiun terus bertambah karena peningkatan jumlah pensiunan

3. Akuntansi Dana Pensiun PPMP (program pensiunan manfaat pasti) Pada Dana Pensiun BTPN yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi dana pensiun PPMP pada BTPN yang disesuaikan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan menerapkan program pensiun manfaat pemerintah, dll. Dalam PSAK No.18, kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terletak pada penentuan kewajiban manfaat pensiun, penilaian aktiva, dan isi laporan keuangan BTPN dalam menentukan kewajiban manfaat pensiun menggunakan rumus manfaat pensiun yang telah ditentukan dalam peraturan dana pensiun sebagaimana dijelaskan pada landasan teori.

Laporan Keuangan Dana Pensiun baik yang menyelenggarakan PPMP maupun PPIP mencakup Laporan Aset Bersih, Laporan Perubahan Aset Bersih, Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dana pensiun BTPN bertujuan bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu dana pensiun pada masa sekarang dan yang akan datang dalam memenuhi kewajiban untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktunya. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank BTPN pada lampiran telah sesuai dengan teori yang ada. Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat dari tabel bawah ini:

Tabel 2.3

**Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun PT.Bank BTPN Dengan
PSAK NO. 18**

Pengungkapan laporan keuangan PSAK Nomor 18	Kesesuaian laporan perubahan asset neto dana pensiun PT.Bank BTPN	
	2016	2017
1. Laporan perubahan asset neto	Sesuai	Sesuai
a. luran pemberi kerja	Sesuai	Sesuai
b. luran pekerja	Sesuai	Sesuai
c. Penghasilan investasi bunga deviden	Sesuai	Sesuai
d. Penghasilan lain	Sesuai	Sesuai
e. Manfaat purnakarya	Sesuai	Sesuai
f. Badan administrasi	Sesuai	Sesuai
g. Beban lain	Sesuai	Sesuai
h. Pajak penghasilan	Sesuai	Sesuai
i. Laba atau rugi pelepasan investasi	Sesuai	Sesuai
j. Penghasilan dari dan kepada program purnakarya	Sesuai	Sesuai

DANA PENSIUN PT. BANK BTPN
LAPORAN ASET BERSIH
PER 31 JANUARI 2016 DAN 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
ASET		
Investasi (nilai wajar)		
Deposita berjangka	145.381.319.910,00	106.994.490.874,00
Saham	12.443.837.500,00	7.602.200.000,00
Obligasi	32.972.674.524,00	25.496.700.000,00
Reksadana		20.920.278.787,00
Jumlah investasi	190.797.831.934,00	161.013.669.661,00
Aset lancar di luar investasi		
Kas dan bank	19.736.641.943,00	3.050.609.823,00
Piutang iuran tambahan	6.115.304.407,00	26.870.106.000,00
Piutang iuran normal	17.597.303.995,00	14.447.459.303,00
Piutang hasil investasi	2.809.162.487,00	1.906.431.600,00
Beban dibayar dimuka	589.085.414,00	559.647.163,00
Piutang lain-lain	3.702.504.414,00	5.426.930.010,00
Jumlah aset diluar investasi	50.550.040.575,00	525.261.183.899,00
Aset operasional		
Perangkat computer	88.331.713,00	81.478.025,00
Peralatan kantor	13.166.625,00	35.193.100,00
Aset operasional lainnya	163770.000,00	373.624.767,00
Jumlah aset opsioanl	265.268.338,00	490.295.767,00
Aset tersedia	241.613.140.847,00	213.765.149.452,00
Kewajiban		
Kewajiban jangka pendek		
Hutang pendek	246.204.022,00	461.523.921,00
Beban yang masih harus dibayar	368.054.565,00	300.477.172,00
Jumlah kewajiban jangka pendek	614.258.587,00	765.010.093,00
Aset bersih	240.998.139.260,00	213.003.139.359,00

DANA PENSIUN PT BANK BTPN MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Per 31 Januari 2016 Dan 2017

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
PENAMBAHAN		
Penambahan investasi		
Bunga	24.784.407.238,00	17.801.506.826.00
Deviden	99.294.807,00	1.179.751.327.00
Laba (rugi) pelepasan investasi	4.010.269.395,00	3.215349.592.00
Jumlah pendapatan investasi	29.790.971.440.00	22.196.607.745.00
Peningkatan (penurunan) nilai investasi		
luran	(4.444.705.624,00)	1.601.467.049.00
luran tambahan	8.525.820.000,00	29.611.248.000.00
luran normal pemberi kerja	19.062.571.340,00	23.511.729.864.00
luran normal peserta	3.074.752.964,00	2.910.588.000.000
Jumlah luran	30.627.144.340,00	56.033.565.864.00
Pendapatan (beban) lain-lain	119.590.983,00	258.050.706.00
Jumlah penambahan	56.093.001,00	80.089.691.409.00
Pengurangan		
Beban investasi	74.419.257,00	294.632.448.00
Beban operasioanal		
Gaji karyawan ,pengurus dan pengawas	1.670.972.358.00	1.407.509.390.00
Beban kantor	747.835.672.00	184.883.303.00
Beben penyusutan aktiva operasional	353.878.505.00	321.667.767.00
Beban jasa pihak ketiga	49.070.479.00	78.100.000.00
Beban operasional lainnya	12.446.540.00	59.281.657`00
Jumlah beban operasional	2.834.203.554.00	2.051.442.117.00
Manfaat pension jatuh tempo	7.632.102.530.00	6.607.269.360.00
Pajak penghasilan badan		371.437.700.00
Koreksi saldo awal (netting)	17.556.532.861.00	
Jumlah pengurangan	28.097.258.202.00	9.324.781.625.00
Kenaikan (penurunan) aktiva bersih	27.995.742.901.00	70.764.909.784.00
Aset bersih awal tahun	213.003.139.359.00	142.238.229.575.00
Aset bersih	240.998.139.260.00	213.003.139.359.00

DANA PENSIUN PT. BANK BTPN

NERACA

PER 31 JANUARI 2016 DAN 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Aset		
Investasi		
Deposita berjangka	145.376.025.609,00	105.421.580.446,00
Saham	13.112.716.442,00	7.887.353.000,00
Obligasi	35.716.358.422,00	29.251.625.000,00
Reksadana		29.251.625.000,00
Jumlah investasi	194.205.100.624,00	159.976.232.727,00
Selisih penilaian investasi	(3.407.268.690,00)	1.037.436.934,00
Aset lancar di luar investasi		
Kas dan bank	19.736.641.943,00	3.050.609.823,00
Piutang iuran tambahan	6.115.304.407,00	26.870.106.000,00
Piutang iuran normal	17.597.303.995,00	14.447.459.303,00
Piutang hasil investasi	2.809.162.488,00	1.906.431.600,00
Beban dibayar dimuka	589.085.414,00	559.647.163,00
Piutang lain-lain	3.702.542.329,00	5.426.930.010,00
Jumlah aset diluar investasi	50.550.040.576,00	52.261.183.899,00
Aset operasional		
Perangkat computer	418.369.050,00	306.923.100,00
Peralatan kantor	145.325.900,00	131.020.900,00
Aset operasional lainnya	851.819.070,00	848.719.069,00
Akumulasi penyusutan	(1.150.245.682,00)	(796.367.177,00)
Jumlah aset operasional	265.268.338,00	490.295.892,00
Selisih kewajiban akturia	47.390.670.355,00	47.862.195.641,00
Jumlah aset	289.003.811.203,00	261.627.345.093,00
Kewajiban		
Kewajiban aktuarial	288.389.552.616,00	260.865.335.000,00
Kewajiban jangka pendek		
Beban yang masih harus dibayar	368.054.565,00	300.477.172,00
Hutang pajak	246.204.022,00	461.523.921,00
Jumlah kewajiban jangka pendek	614.258.587,00	762.010.093,00
Jumlah kewajiban	289.003.811.203,00	261.627.345.093,00

DANA PENSIUN PT.BANK BTPN
 PERHITUNGAN HASIL USAHA
 PER 31 JANUARI 2016 DAN 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan		
Bunga	24.784.407.238,00	17.801.506.826,00
Deviden	996.294.807,00	1.179.751.327,00
Laba (rugi) pelepasan investasi	4.010.269.395,00	3.215.349.592,00
Jumlah pendapatan investasi	29.790.971.440,00	22.215.349.592,00
Beban investasi	74.419.971.440,00	22.196.607.745,00
Beban operasional		
Gaji karyawan, pengurus dan pengawas	1.670.972.358,00	1.407.509.390,00
Beban kantor	747.835.627,00	148.885.303,00
Beban penyusutan aset operasional	353.878.505,00	321.665.767,00
Beban jasa pihak ketiga	49.070.479,00	78.100.000,00
Beban operasional lainnya	12.446.540,00	59.281.657,00
Jumlah beban operasional	2.834.203.554,00	2.051.442.117,00
Pendapatan dan lain-lain	119.590.983,00	258.050.706,00
Hasil usaha sebelum pajak	27.001.939.612,00	20.108.583.886,00
Pajak penghasilan		371.437.700,00
Hasil usaha setelah pajak	27.001.939.612,00	19.737.146.186,00

DANA PENSIUN PT.BANK BTPN

LAPORAN ARUS KAS

PER 31 JANUARI 2016 DAN 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Arus Aset dari aset investasi		
Penerimaan bunga		
Penerimaan deviden	24.784.407.238,00	17.801.506.826.00
Pelepasan investasi	99.294.807,00	1.179.751.327.00
Penanaman investasi	4.010.269.395,00	3.215349.592.00
Pembayaran beban investasi	29.790.971.440.00	22.196.607.745.00
kas bersih dari aset investasi	(4.060.155.793.00)	(11.268.700.056.00)
Arus kas dari aset operasional		
Pembayaran aset operasional	8.525.820.000,00	29.611.248.000.00
Pendapatan dan beban lain-lain	19.062.571.340,00	23.511.729.864.00
Arus kas dari aset operasional	3.074.752.964,00	2.910.588.000.000
Arus kas dari aset pendanaan		
Penerimaan iuran normal	119.590.983,00	258.050.706.00
Penerimaan iuran tambahan	56.093.001,00	80.089.691.409.00
Pembayaran manfaat pensiun	7.632.102.530.00	(6.607.269.360.00)
Penerimaan piutang dari pendiri/YDPB-AP	74.419.257,00	294.632.448.00
Arus kas bersih dari aset pendanaan	23.589.433.00	8.771.368.895.00
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	1.670.972.358.00	1.407.509.390.00
Kas dan setara kas awal priode	747.835.672.00	184.883.303.00
Kas dan bank akhir priode	353.878.505.00	321.667.767.00

Proses akuntansi yang di terapkan oleh dana pensiun PT.Bank BTPN Makassar keseluruhan telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan akuntansi dana pensiun pemberi kerja yang menerapkan program manfaat pasti yang berdasarkan UU No.11 tahun 1992.

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.18 kekhususan standar akuntansi keuangan dana pensiun terletak pada penentuan kewajiban manfaat pensiun, penilaian asset dan isi laporan keuangan dana pensiun PT.Bank BTPN Makassar dalam menentukan kewajiban manfaat pensiun menggunakan rumus manfaat pensiun yang telah ditentukan dalam peraturan dana pensiun. Sebagaimana dijelaskan pada landasan teori. Laporan keuangan dana pensiun baik yang menyelenggarakan PPMP (program pensiun manfaat pasti) PPIP (program pensiun imbalan pasti) mencakup laporan asset bersih. Laporan perubahan asset, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan dana pensiun PT.Bank BTPN pada lampiran telah sesuai dengan teori yang ada untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Perbandingan Program Dana Pensiun dengan PSAK 18

No	Keterangan	DP Bank PT.BTPN	PSAK No. 18
1.	Keterangan umum	-UU No. 11 Tahun 1992 tanggal 20 april 1992 tentang dana pensiun, -PP N0.76 tahun 1992 tanggal 30 November 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja, -Peraturan dana pensiun BTPN Serta arahan investasi oleh pendiri dan dewan Pengawas	Peraturan perundangyang berlaku
2.	Rumus manfaat	Rumusnya dinilai brdasarkan masa kerja, faktor penghargaan pertahun masa kerja,dan penghasilan dasar pensiun	Besarnya manfaat pensiun yang di janjikan kepada peserta ditentukan dengan rumusmanfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan pertahun masa kerja,dan penghasilan dasar pensiun.
3.	Pelaporan	a) Kegiatan priodik yang di sampaikan oleh auditor	a.)penjelasan mengenai kegiatan selama satu priode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan perubahan dana pension b.)laporan tentang transaksi tenaga kerja investasi selama selama priode pelaporan dan posisi keuangan dana pension pada akhir periode pelaporan.

D. Pembahasan

Penyajian laporan perubahan asset neto dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 18 mengenai dana pensiun yang sebelumnya telah dibahas pada tinjauan pustaka yaitu terdapat iuran pemberi kerja, iuran pekerja, penghasilan investasi seperti bunga dan deviden, penghasilan lain, manfaat yang dibayarkan atau terutang, beban administrasi beban lain, pajak penghasilan, laba atau rugi, pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi, dan penghasilan dari dan kepada program purnakarya lain.

Pada laporan perubahan asset neto Dana Pensiun PT. Bank BTPN Makassar terdapat hal-hal yaitu terdapat akun pendapatan investasi yang didalamnya terdiri dari bunga, deviden, sewa, laba, (rugi) pelepasan investasi dan pendapatan investasi lain. Selanjutnya terdapat akun peningkatan (penurunan) nilai investasi yang terdiri dari dana pensiun lain dan penambahan asset neto lain. Pada iuran jatuh tempo terdiri dari iuran normal pemberi kerja, iuran normal peserta dan iuran tambahan. Terdapat juga akun pengurangan yang terdiri dari beban investasi, beban operasional beban diluar investasi dan operasional, manfaat pensiun, pajak penghasilan dan pengalihan dana ke dana pensiun lain. Kemudian total dari akun-akun tersebut dapat diketahui kenaikan (penurunan) asset netto, asset netto awal tahun dan asset netto akhir tahun. Sehingga pada laporan perubahan asset neto Dana Pensiun PT. Bank BTPN Makassar pencatatannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18.

Laporan keuangan dana pensiun PT, Bank BTPN Makassar pada posisi asset terdiri dari investasi (nilai *historis*), selisih penilaian investasi, asset lancar diluar investasi, asset operasional dan asset lain-lain. Akun investasi (nilai *historis*) terdiri dari surat berharga negara, *deposition call*, deposito berjangka, saham, obligasi, reksadana pasar uang pendapat tetap, saham dan campuran, unit pernyataan dan investasi *real estent*, berbentuk kontrak investasi kolektif, penempatan langsung, tanah, bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Pada asset lancar diluar investasi dan piutang hasil investasi. Piutang iuran terdiri dari iuran normal pemberi kerja, iuran normal peserta, iuran tambahan. Selanjutnya terdapat asset operasional yang terdiri dari perangkat computer, peralatan kantor dan akumulasi penyusutan. Kemudian total asset dapat diketahui dari perhitungan keseluruhan.

Selanjutnya pada posisi liabilitas terdiri dari nilai kini actuarial, selisih liabilitas nilai kini actuarial dari liabilitas diluar nilai kini aktarial. Pada liabilitas nilai actuarial kini actuarial terdiri dari liabilitas actuarial. Pada liabilitas di luar nilai kini actuarial terdiri dari hutang manfaat pensiun jatuh tempo, beban yang masih harus dibayar, liabilitas lain. Kemudian dapat diketahui total liabilitas dari perhitungan keseluruhan.

Pada laporan dana pensiun terdapat laporan perhitungan hasil usaha. Laporan perhitungan hasil usaha dana pensiun PT. Bank BTPN Mkaassar terdiri dari pendapatan investasi, beban operasional, dan pendapatan dan bebanm lain-lain. Pada pendapatan investasi terdiri dari bunga, deviden sewa, laba (rugi) pelepasan / perolehan investasi dan pendapatan investasi lain. Selanjutnya beban investasi terdiri dari beban transaksi, beban

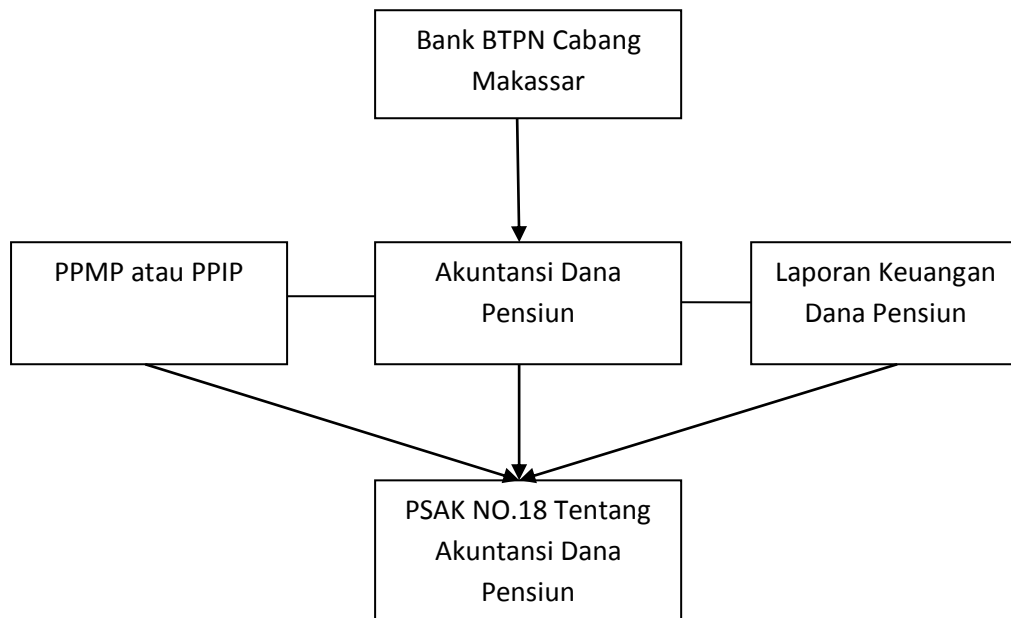
pemeliharaan tanah dan bangunan, beban investasi lainnya. Kemudian dapat diperoleh hasil usaha investasi dari total pendapatan investasi dan total beban investasi. Pada beban operasional terdiri dari gaji karyawan, pengurus dan sewa pengawas, beban kantor, beban pemeliharaan, beban penyusutan aktiva operasional. Kemudian dari total keseluruhan di peroleh hasil usaha sebelum pajak. Selanjutnya hasil usaha dana pensiun PT, Bank BTPN Makassar terdapat pajak penghasilan yang dikenakan dan dapat diperoleh hasil usaha setelah pajak dari total usaha sebelum pajak dan pajak penghasilan.

Pada laporan keuangan dana pensiun PT, Bank BTPN Makassar dapat dilihat kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan NO.18 pada laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaa prnakarya yang menunjukkan hal-hal yaitu iuran pemberi kerja, iuran pekerja, penghasilan investasi seperti bunga dan deviden, penghasilan lain, manfaat yang dibayarkan atau terutang, beban administrasi, beban lain, pajak penghasilan, laba atau rugi pelepasan investasi atau perubahan investasi, dan penghasilan dari dan kepada program purnakarya telah terdapat dalam laporan perubahan asset neto dana pensiun PT, Bank BTPN.

Dana pensiun PT, Bank BTPN merupakan dana pensiun program pensiun manfaat pasti dan prosedur dan penerapan dana pensiun PT, Bank BTPN diatur oleh undang-undang NO.11 Tahun 1992 dan otoritas jasa Keuangan (OJK). Pada laporan keuangan tahunan dana pensiun PT, Bank BTPN telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO.18. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2010 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 merupakan

pernyataan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang di mulai pada tanggal 1 januari 2012 dan hanya memiliki tata bahasa yang berbeda namun peraturannya tetap sam dan PSAK NO.18 2015 per efektif 1 januari 2014 disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan berlaku efektif 1 januari 2015.

Hasil Analisis Dana Pensiun Bank BTPN



Gambar 4.2

Hasil Analisis Bank BTPN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Informasi dan pelaporan yang di ungkapkan dalam pelaporan keuangan dana pensiun pada Bank BTPN telah mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku PSAK No.18. Hal tersebut dapat dilihat dari palaporan keuangan dana pensiun Bank BTPN bahwa Bank BTPN telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan PSAK No.18 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan
2. Sumber pendanaan berasal dari iuran peserta dana pensiun. Dana pensiun Bank BPTN menggunakan bantuan aktuaris dalam mengestimasi manfaat purnakarya yang akan diterima peserta dana pensiun
3. Kualitas pendanaan dana pensiun PT.Bank BTPN telah masuk dalam kategori pendanaan dana pensiun yang satu dalam artian sangat patuh dalam menjalankan semua tugas-tugas aturan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak manajemen membuat daftar nama-nama pegawai yang ikut dalam program pensiun manfaat pasti
2. Agar supaya asumsi yang digunakan pada perhitungan aktuaria berikutnya dapat lebih akurat, maka dana pensiun perlu melakukan pencatatan lengkap dan terinci atas data peserta yang berhenti baik mengenai jumlah peserta berhenti maupun sebab-sebab berhentinya

3. Dana pensiun Lembaga keuangan PT.Bank BTPN diharapkan memepertahankan kredibilitas penyusunan laporan keuangan agar dapat tetap konsisten sesuai dengan pernyataan standar akuntansi PSAK No.18.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin .2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan*.Rajawali Pers.Jakarta.
- Andriani, ensiwi. 2010. Perhitungan Dana Pensiun untuk Dana Pensiun Normal Berdasarkan metode *constant dollar* studi kasus PT Taspen Palembang. *jurnal penelitian sainz volume.12 no.2*
- Agustina Anggraeni agustina kurnia. 2012 Analisis Kinerja Keuangan Dan Rasio Kecukupan Dana Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Manfaat Pasti Di Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 1 No. 11
- Dwiranda.2010. Kecukupan PSAK Tentang akuntansi dana pensiun dalam mengakomodasi kebutuhan standar akuntansi investasi tanah dan bangunan, *Jurnal ekonomi dan biusnis* volume 10.no 3
- Efendi Wahyu. 2014.Analisis Penerapan Psak No 18 Mengenai Dana Pensiun Pada Laporan Keuangan Dan Pensiun Bank Rakyat Indonesia, *artikel ekonomi*.
- Ismail.2010 Manajemen Perbankan.Prenada Media Group.Jakarta.
- Kasmir. 2014.*Dasar-Dasar Perbankan* .Rajawali Pers.Jakarta.
- Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2345/LK/2003
- Nussy,Andika. 2017. Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT.Taspen Cabang Manado. *Jurnal Bisnis Terapan Vo.1 No.1*
- Puspitasari, Tony,Agus. 2016. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK.*Jurnal EMBA*, Volume.4 No.1
- Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No.11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- Republik Indonesia. 1992 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 1992.Dana Pensiun.Jakarta
- Rengkung, kalangi lintje. 2015. Evaluasi pencatatan dan pelaporan dana pensiun pada dana pensiun pemberi kerja (studi kasusu pada PT. PLN wilayah suluttenggo). *jurnal berkala ilmiah efesiensi* volume 15 no.3.
- Saefuloh.2015. Penerapan Psak No.18 Pada Dana Pensiun Dan Laporan Keuangan Dana Pensiun Pada PT Taspen BTPN Medan.*Jurnal EMBA*, Volume.2 No.1

Tanjung fahmi,Pratono. 2013. Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pns Pensiunan Guru Kota Medan.*Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Volume. 1, No.4

Taswan.2015.Akuntansi Perbankan, Edisi III.YogyakartaUPP STIM YKPN.

Wardhani, Herwanto. 2015. Penerapan Psak No.18 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero).*Jurnal Bisnis Terapan* Volume 01 no 2

Wahab, Zulaini, 2005. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

RIWAYAT HIDUP



JUMRIANI NADIR Lahir pada tanggal 01 Juli 1994 di Desa Buttu-batu Dusun Bajumata, yang merupakan anak pertama dari 10 bersaudara yang diamanahkan Allah SWT kepada pasangan Ayahanda tercinta Nadir dan Ibunda tercinta Rosdiana.

Pada tahun 2007, penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Negeri No.42 Buttu Batu. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 ENREKANG, dan tamat pada tahun 2010. Kemudian dengan tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 PAREPARE dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya di tahun yang sama pula yakni tahun 2013 penulis melanjutkan Studi pada Jurusan Akuntansi dan mengambil Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar